

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Arba, H.M, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darmayuda, Made Suasthawa, 1987, *Status dan Fungsi Tanah Adat di Bali Setelah Berlakunya UUPA*, Kayu Mas, Denpasar.
- , 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar.
- Emirzon, Joni 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Paragih, Effendi, 1991, *Praktek Penggunaan Tanah sebagai Jaminan Kredit*, Rajawali, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik, 1977, *Hak Anda atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Saragih, Djaren, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Sirtha, I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2001, *Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2011, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudantra, I Ketut, Wayan P. Windia dkk, 2011, *Penuntun Penyuratan Awig-Awig*, Udayana University Press, Denpasar.

- Sudantra, I Ketut dan A.A. Gede Oka Parwata, 2010, *Wicara Lan Pamidanda*, Udayana University Press, Denpasar
- Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.
- Syarani, Riduan, 1985, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Windia, Wayan P. dan Sudantra, Ketut, 2016, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Swasta Nulus, Denpasar.

## **B. Tesis/Disertasi:**

- Agung, Anak Agung Istri, “Status Hukum dan Kepemilikan Tanah Pekarangan Desa (PKD) dan Tanah Ayahan Desa (AYDS) di Kabupaten Badung Setelah Berlakunya UUPA”, *Thesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Ivan, Yohanes, “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan”, *Thesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.
- Munir, Moch, Penggunaan pengadilan negeri sebagai Lembaga untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

## **C. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang kedudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1988 Seri D No. 3

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa *Pakraman*. Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 29 tahun 2001 Seri D NO. 29

Awig-awig Desa Tenganan Pegringsingan

#### **D. Internet**

Badan pertanahan Nasional, “Penanganan Kasus Pertanahan”, <http://www.bpn.go.id.>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018.